

LAPORAN AKHIR

**PROSEDUR PEMERIKSAAN BELANJA PEGAWAI PADA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN X
TAHUN ANGGARAN 2023**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : I GEDE EKALANA

NIM : 126232135

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2024

LAPORAN AKHIR

**PROSEDUR PEMERIKSAAN BELANJA PEGAWAI PADA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN X
TAHUN ANGGARAN 2023**

**LAPORAN AKHIR DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
UNTUK KELULUSAN PADA PADA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : I GEDE EKALANA

NIM : 126232135

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul : Prosedur Pemeriksaan Belanja Pegawai pada
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
X Tahun Anggaran 2023

Nama : I Gede Ekalana

NIM : 126232135

Nama Dosen Pembimbing : Widyasari, SE., M.Si, Ak., CPA, CA, ASEAN CPA

Disusun oleh,



I Gede Ekalana
126232135

Disetujui oleh,
Dosen Pembimbing



Widyasari, SE., M.Si, Ak., CPA, CA, ASEAN CPA

**PROSEDUR PEMERIKSAAN BELANJA PEGAWAI PADA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN X
TAHUN ANGGARAN 2023**

I GEDE EKALANA

126232135

ABSTRACT

To ensure transparency and accountability, Regional Governments are required to produce Financial Report of Regional Government. BPK audit these statements, including a close look at Personnel Expenditure. Because Personnel Expenditure is complex and sensitive, errors in this area are common audit findings. This study aims to explain the audit procedures used to audit Personnel Expenditure in the 2023 Financial Report of Regional Government X and to present the findings of the audit. The result of the study shows that there are 21 steps taken in conducting an audit of Personnel Expenditures in the Financial Report of the Regional Government of Regency X in the 2023. Based on the results of implementing these procedures, it is known that the administration of Employee Expenditures in the Regional Government of Regency X in the 2023 is not yet orderly.

Keywords: personnel expenditure, audit procedure, financial report of regional government

ABSTRAK

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Salah satu bentuk dari pemeriksaan keuangan yang dilaksanakan oleh BPK adalah Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam tahap pelaksanaan pemeriksaan dilakukan prosedur pengujian. Pengelolaan belanja pegawai menjadi titik rawan dalam pengelolaan keuangan karena sifatnya yang sangat sensitif dan kompleks. Ketidaktepatan dalam pengelolaan bagian ini seringkali menjadi temuan berulang dalam pemeriksaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pemeriksaan dan hasil dari pelaksanaan prosedur tersebut pada Belanja Pegawai yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten X Tahun Anggaran 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 21 langkah yang dilaksanakan dalam melakukan pemeriksaan atas Belanja Pegawai pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten X Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan hasil pelaksanaan prosedur tersebut diketahui bahwa penatausahaan Belanja Pegawai pada Pemerintah Daerah Kabupaten X Tahun Anggaran 2023 belum tertib.

Kata Kunci: belanja pegawai, prosedur pemeriksaan, laporan keuangan pemerintah daerah

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan akhir yang berjudul **“Prosedur Pemeriksaan Belanja Pegawai pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten X Tahun Anggaran 2023”**.

Penulis menyadari bahwa laporan akhir ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M selaku Rektor Universitas Tarumanagara.
2. Bapak Prof. Dr. Sawidji Widioatmojo, SE., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Bapak Dr. Jamaludin Iskak, SE., M.Si., Ak., CPI., CA., CPA selaku Ketua Program Studi Program Pendidikan Akuntan.
4. Ibu Widyasari, SE., M.Si, Ak., CPA, CA, ASEAN CPA selaku Dosen Pembimbing atas waktu, bimbingan, masukan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan laporan akhir.
5. Bapak Dadek Nandemar S.E., MIT., Ak., CFE, CA, CSFA serta seluruh rekan-rekan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara atas dukungan dan masukan dalam menyelesaikan laporan akhir ini.
6. Seluruh dosen dan pegawai Universitas Tarumanagara atas dukungan dan motivasi selama masa perkuliahan.
7. Seluruh keluarga dan teman-teman atas doa serta dukungan yang tulus dan tiada henti untuk memotivasi penulis selama masa perkuliahan hingga laporan akhir ini selesai.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan laporan akhir ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan serta pengalaman penulis. Namun demikian laporan akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi yang berkepentingan.

Jakarta, 18 November 2024



I Gede Ekalana

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Formulasi Masalah	3
1.3. Ruang Lingkup	3
1.4. Tujuan Penelitian.....	3
1.5. Manfaat Penelitian.....	3
BAB II LANDASAN TEORI	4
2.1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	4
2.2. Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah.....	5
2.3. Temuan Pemeriksaan.....	6
2.4. Belanja Pegawai	8
BAB III METODE PENELITIAN	9
3.1. Objek Penelitian	9
3.2. Teknik Pengumpulan Data	9
3.3. Teknik Analisis Data.....	9
BAB IV HASIL DAN BAHASAN.....	10
4.1. Prosedur Pemeriksaan Belanja Pegawai.....	10
4.2. Hasil Pelaksanaan Prosedur Pemeriksaan Belanja Pegawai	13
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	26
5.1. Simpulan.....	26
5.2. Saran	26
REFERENSI.....	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023	13
Tabel 2 Rincian Gaji kepada ASN yang telah Pensiun	14
Tabel 3 Rincian Gaji kepada ASN yang Melakukan Tindak Pidana.....	15
Tabel 4 Rincian Kelebihan Pembayaran Tunjangan ASN yang Tubel.....	16
Tabel 5 Rincian Kelebihan Pembayaran Tunjangan kepada ASN Aparat Desa.....	17
Tabel 6 Rincian Penerimaan TPP dan Honorarium UKPBJ TA 2023.....	19
Tabel 7 Besaran Honor (OB) UKPBJ	20
Tabel 8 Ketidaksesuaian Bobot Perhitungan TPP	21
Tabel 9 Kelebihan Pembayaran TPP	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hingga saat ini Pemerintah terus melakukan penanggulangan inefisiensi manajemen keuangan publik. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah yaitu melalui reformasi birokrasi di bidang manajemen keuangan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang bersumber dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak (Sougi S, dkk, 2020).

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kepala Daerah diwajibkan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa LKPD yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), paling lambat enam (6) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan hasil laporan keuangan konsolidasi atas laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang disusun oleh kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 6 Ayat (1) menyatakan bahwa, “BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara”.

Salah satu bentuk dari pemeriksaan keuangan yang dilaksanakan oleh BPK adalah Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemeriksaan LKPD adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar

pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah sebagai dasar pemberian opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan.

Dalam tahap pelaksanaan Pemeriksaan LKPD dilaksanakan prosedur pengujian pengendalian, prosedur pengujian substantif, prosedur pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pelaksanaan prosedur pengujian jika terdapat indikasi permasalahan maka dapat disusun temuan pemeriksaan.

Temuan Pemeriksaan merupakan indikasi permasalahan yang diperoleh selama proses pelaksanaan pemeriksaan yang terjadi akibat adanya perbedaan kondisi dengan kriteria pemeriksaan. Temuan Pemeriksaan BPK diharapkan memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, dan profesionalisme.

Pegawai merupakan unsur yang penting bagi organisasi. Organisasi dapat berjalan karena adanya unsur pegawai yang menjalankannya, sehingga wajar jika dikatakan pegawai merupakan kekuatan utama dari organisasi. Pengelolaan pegawai meliputi perekrutan, pengangkatan, penempatan, dan pemberian kompensasi.

Pemberian kompensasi kepada pegawai dalam lingkup Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk Belanja Pegawai. Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus pegawai negeri sipil sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal (Astuty, 2022).

Pengelolaan belanja pegawai menjadi titik rawan dalam pengelolaan keuangan karena sifatnya yang sangat sensitif dan kompleks (Syahrudin, 2022). Ketidaktepatan dalam pengelolaan bagian ini seringkali menjadi temuan berulang dalam pemeriksaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian mengenai **“Prosedur Pemeriksaan Belanja Pegawai pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten X Tahun Anggaran 2023”**.

1.2. Formulasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana prosedur pemeriksaan belanja pegawai yang dilaksanakan oleh BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten X tahun anggaran 2023?
- 2) Apa hasil dari pelaksanaan prosedur pemeriksaan belanja pegawai yang dilaksanakan oleh BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten X tahun anggaran 2023?

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi pada prosedur pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten X tahun anggaran 2023 khususnya pada penyajian Belanja Pegawai. Keterbatasan data yang dapat ditampilkan mengikuti kebijakan untuk tetap menjaga redaksi maupun nama tetap *confidential*.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- 1) Menjelaskan prosedur pemeriksaan belanja pegawai yang dilakukan oleh BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten X Tahun Anggaran 2023.
- 2) Menjelaskan hasil dari pelaksanaan prosedur pemeriksaan belanja pegawai pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten X Tahun Anggaran 2023.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Sebagai sumber referensi untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan terkait prosedur pemeriksaan belanja pegawai pada laporan keuangan pemerintah daerah.
- 2) Sebagai gambaran terkait hasil dari pelaksanaan prosedur pemeriksaan belanja pegawai pada laporan keuangan pemerintah daerah.

REFERENSI

- Ardiansyah, R. &. (2023). Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1-9.
- Astuty, S. (2022). Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Jilid 8 Nomor 3, November 2022*, 475-487.
- Badiklat PKN BPK RI. (2022). *Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Diklat JFPAP*. Jakarta: Badiklat PKN BPK RI.
- Badiklat PKN BPK RI. (2022). *SPKN untuk Diklat JFPAP*. Jakarta: Badiklat PKN BPK RI.
- Badiklat PKN BPK RI. (2022). *Teknis Penulisan Temuan Pemeriksaan*. Jakarta: Badiklat PKN BPK RI.
- Nadiaz, N. E., & Budiwitjaksono, G. S. (2024). Penerapan Prosedur Vouching dan Konfirmasi dalam Audit Investigatif atas Akun Beban Gaji (Studi Kasus pada PT X). *Jurnal Riset Akuntansi Vol.2, No.3 Agustus 2024*, 155-168.
- Sougi S, T., Rahayu, S., & Machpuddin, A. (2018). Analisis Temuan BPK RI atas Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun Anggaran 2014-2016. *Jurnal Universitas Jambi*.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrudin. (2022). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Pegawai pada Satker Lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima dan Kota Bima. *Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) Vol. 8, No. 2, April 2022*, 1309-1323.